



## Evaluasi Program Pelayanan Sosial terhadap Anak Terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Yayasan Sayap Ibu

Muhammad Andra Nurramadhan<sup>1\*</sup>, Irhamni Rahman<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email: [muhammad.andra1811@gmail.com](mailto:muhammad.andra1811@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [irhamni.rahman@umj.ac.id](mailto:irhamni.rahman@umj.ac.id)<sup>2</sup>

\*Penulis Korespondensi: [muhammad.andra1811@gmail.com](mailto:muhammad.andra1811@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** *This research was conducted to analyze the process of providing social services for abandoned children at the Sayap Ibu Foundation. Abandoned children are seen as a group with a high level of vulnerability and therefore require special intervention in fulfilling basic rights, protection, and developing their personal capacity so they can develop optimally. The research method applies a qualitative approach that uses interview processes, observations, and documentation studies to obtain the required information. Research findings show that the services provided include aspects of protection, education, fulfillment of basic needs, and psychosocial development which are implemented in an integrated manner by professional staff and volunteers. In its implementation, this service still faces a number of obstacles, including limited human resources, infrastructure, and minimal support from the community, which has an impact on the suboptimal service. However, the Sayap Ibu Foundation still has a significant contribution in improving the welfare of abandoned children through various programs oriented towards social rehabilitation, character strengthening, and empowerment. Therefore, it can be concluded from this study that it is necessary to strengthen comprehensive and sustainable services, as well as closer collaboration between institutions, government and the community in order to increase the effectiveness of handling neglected children by utilizing the functions and roles of foundations to the maximum. Then, the implications of the results of this study can be used as consideration for policy makers and social actors in designing more effective service programs for neglected children.*

**Keywords:** *Abandoned Children; Program Evaluation; Sayap Ibu Foundation; Social Services; Social Welfare.*

**Abstrak.** Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis proses penyelenggaraan pelayanan sosial bagi anak terlantar di Yayasan Sayap Ibu. Anak terlantar dipandang sebagai kelompok dengan tingkat kerentanan tinggi sehingga memerlukan intervensi khusus dalam pemenuhan hak dasar, perlindungan, serta pengembangan kapasitas diri agar dapat berkembang secara optimal. Metode penelitian menerapkan pendekatan kualitatif yang menggunakan proses wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa layanan yang diberikan meliputi aspek perlindungan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pembinaan psikososial yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh tenaga profesional dan relawan. Dalam implementasinya, pelayanan tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta minimnya dukungan dari masyarakat yang berdampak pada belum optimalnya layanan. Namun demikian, Yayasan Sayap Ibu tetap memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan anak terlantar melalui berbagai program yang berorientasi pada rehabilitasi sosial, penguatan karakter, dan pemberdayaan. Oleh karena itu dapat disimpulkan pada penelitian ini bahwa diperlukan penguatan pelayanan yang komprehensif dan berkesinambungan, serta kolaborasi yang lebih erat antara lembaga, pemerintah, dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas penanganan anak terlantar dengan memanfaatkan fungsi dan peran yayasan dengan maksimal. Kemudian implikasi dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan pelaku sosial dalam merancang program pelayanan yang lebih efektif untuk anak terlantar.

**Kata kunci:** Anak Terlantar; Evaluasi Program; Kesejahteraan Sosial; Pelayanan Sosial; Yayasan Sayap Ibu.

### 1. LATAR BELAKANG

Permasalahan anak terlantar di Indonesia masih menjadi isu sosial yang kompleks dan memerlukan perhatian serius, menurut data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar mencapai ratusan ribu jiwa yang tersebar di berbagai wilayah, dengan faktor penyebab yang beragam seperti kemiskinan struktural,

disorganisasi keluarga, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta dampak bencana sosial dan alam. Kondisi tersebut mengakibatkan anak kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta meningkatkan kerentanan terhadap eksploitasi, perdagangan manusia, dan kekerasan (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2022).

Dalam sistem perlindungan anak di Indonesia, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) memiliki peran strategis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. LKS berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam implementasi kebijakan perlindungan anak. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan individu, lembaga ini mampu memberikan pelayanan yang lebih responsif terhadap kondisi anak terlantar (Republik Indonesia, 2002).

Salah satu lembaga yang berperan dalam penanganan anak terlantar adalah Yayasan Sayap Ibu, lembaga ini berfokus kepada pemberian perlindungan, pengasuhan, serta pengembangan potensi anak. Program yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup pembinaan karakter dan pemberdayaan anak agar mampu hidup mandiri dan berfungsi secara sosial. Namun demikian, pelayanan sosial terhadap anak terlantar menghadapi berbagai tantangan, seperti kompleksitas latar belakang anak, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya dukungan finansial, serta rendahnya partisipasi masyarakat (Yayasan Sayap Ibu, 2025).

Dampak penelantaran anak tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup gangguan perkembangan kognitif, sosial, dan emosional. Anak terlantar berisiko mengalami putus sekolah, eksploitasi, serta keterlibatan dalam perilaku menyimpang. Faktor penyebab penelantaran yang beragam, seperti kemiskinan, kematian orang tua, dan kondisi keluarga yang tidak harmonis, semakin memperparah kondisi tersebut (Shonkoff & Garner, 2012).

Fenomena ini juga terlihat di Provinsi Banten, yang mencatat sekitar 181.235 anak terlantar dengan sebaran terbesar di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Tangerang. Upaya penanganan anak terlantar telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui berbagai program sosial, seperti penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti serta penanganan kasus individu oleh Dinas Sosial. Namun, efektivitas kebijakan daerah, seperti Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010, masih menjadi perhatian karena implementasinya dinilai belum berjalan secara optimal dan belum didukung oleh koordinasi yang kuat antar lembaga terkait (Dinas Sosial Provinsi Banten, 2022).

Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil turut berkontribusi dalam penanganan anak terlantar, salah satunya melalui peran Yayasan Sayap Ibu Cabang Banten yang aktif dalam memberikan pengasuhan, perawatan, serta pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Namun demikian, berbagai kendala masih dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas pendukung, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat. Sinergi antar pemangku kepentingan ini menjadi kunci dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak terlantar, sekaligus menjamin keberlanjutan masa depan mereka secara lebih baik.

Pelayanan sosial sebagai bagian dari upaya kesejahteraan sosial yang memiliki peran penting dalam membantu individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan keberfungsian sosialnya. Dalam konteks anak terlantar, pelayanan sosial tidak hanya berfungsi sebagai intervensi pemecahan masalah, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar anak dapat kembali berfungsi secara optimal di masyarakat. Meskipun program telah berjalan, belum diketahui secara mendalam sejauh mana efektivitas pelaksanaan program tersebut. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi program yang komprehensif untuk menilai keberhasilan serta mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaan pelayanan sosial (Wirawan, *Evaluasi: Teori, model, standar, aplikasi, dan profesi.*, 2011).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi program pelayanan sosial terhadap anak terlantar di Yayasan Sayap Ibu dengan menggunakan pendekatan evaluasi yang mencakup aspek input, proses, dan output. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan evaluatif yang komprehensif, fokus pada lembaga spesifik, serta analisis terhadap capaian hasil program dalam meningkatkan kesejahteraan anak terlantar. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis dalam pengembangan ilmu kesejahteraan sosial maupun secara praktis sebagai rekomendasi bagi peningkatan kualitas pelayanan sosial di Indonesia.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Pelayanan Sosial**

Pelayanan sosial pada prinsipnya merupakan suatu proses yang dirancang secara sistematis dan berkelanjutan untuk membantu individu maupun kelompok dalam memenuhi kebutuhan sosial melalui berbagai pendekatan yang relevan. Konsep pelayanan sosial, menurut

Soetarso, merupakan integrasi antara unsur “pelayanan” dan “sosial”, yang dimaknai sebagai aktivitas pemberian bantuan kepada individu, baik dalam bentuk material maupun nonmaterial, dengan tujuan meningkatkan kemampuan individu dalam mengatasi permasalahan secara mandiri (Soetarso, 1993).

Menurut Johnson yang dikutip dalam Fahrudin, pelayanan sosial diartikan sebagai serangkaian program dan aktivitas yang melibatkan pekerja sosial maupun tenaga profesional lainnya, yang secara khusus diarahkan untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Dalam pandangan ini, Johnson menitikberatkan pada peran program kerja yang dijalankan oleh pekerja sosial atau tenaga profesional sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Namun demikian, konsep yang dikemukakan Johnson belum memberikan penjelasan yang rinci mengenai kriteria atau batasan yang dimaksud dengan tenaga profesional tersebut (Fahrudin, 2012).

Pada dasarnya, pelayanan sosial berorientasi pada upaya membantu individu dan komunitas dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan yang semakin kompleks. Fahrudin (2012) menjelaskan bahwa pelayanan sosial merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memberikan bantuan kepada individu dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup, memulihkan kondisi kesejahteraan, mempertahankan fungsi sosial, serta meningkatkan kualitas hidup terutama dalam aspek sosial. Dalam pelaksanaannya, pelayanan sosial memanfaatkan berbagai sumber daya sosial yang tersedia serta melalui tahapan-tahapan intervensi tertentu guna memperkuat kapasitas individu dan keluarga dalam menghadapi tuntutan dan dinamika kehidupan sehari-hari.

### **Anak Terlantar**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh individu yang belum mencapai usia 18 tahun, bahkan sejak masih dalam tahap janin, sudah termasuk dalam kategori anak. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan setelah lahir, tetapi juga dimulai sejak masa sebelum kelahiran hingga anak mencapai usia 18 tahun.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada Pasal 1 ayat (6), anak terlantar didefinisikan sebagai anak yang tidak memperoleh pemenuhan kebutuhan secara layak, baik dalam aspek fisik, mental, spiritual, maupun sosial (Republik Indonesia, 2002).

Anak terlantar pada dasarnya merupakan anak yang termasuk dalam kelompok rentan dan membutuhkan perlindungan khusus. Keterlantaran tidak hanya terjadi karena anak

kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya, tetapi juga ketika hak-hak dasar anak tidak terpenuhi dengan baik. Hak tersebut meliputi kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, memperoleh pendidikan yang layak, serta mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kelalaian orang tua, kurangnya pemahaman, keterbatasan ekonomi, maupun unsur kesengajaan.

Selain itu, anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau tidak diinginkan cenderung lebih berisiko mengalami penelantaran maupun perlakuan yang tidak baik (*child abuse*). Dalam kondisi yang lebih parah, penelantaran dapat berupa tindakan orang tua yang meninggalkan anak di tempat-tempat umum atau tidak layak, baik karena alasan sosial, seperti menutupi rasa malu, maupun karena ketidaksiapan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua.

### **Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)**

Buku Standar Nasional Pengasuhan Anak menjelaskan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan lembaga yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial, yang dapat didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan berfungsi dalam penyelenggaraan pengasuhan serta perawatan anak. LKSA berperan dalam memberikan layanan kesejahteraan kepada anak-anak yang kehilangan orang tua maupun yang mengalami penelantaran akibat permasalahan sosial dalam keluarga.

Salah satu bentuk LKSA yang umum dikenal adalah panti asuhan, yang memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan pengasuhan alternatif. Layanan tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, sosial, dan kebutuhan lainnya bagi anak asuh, serta memastikan mereka memperoleh pengasuhan yang layak dan kesempatan yang memadai untuk mengembangkan diri. Kondisi ini biasanya muncul ketika keluarga tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam memenuhi kebutuhan anak, sehingga menyebabkan terjadinya penelantaran (Zastrow, Charles, & Kirst-Ashman, 2016).

Faktor-faktor penyebab penelantaran anak dapat berasal dari berbagai kondisi sosial dan ekonomi. Pertama, keterbatasan ekonomi dalam keluarga maupun lingkungan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penelantaran anak. Kedua, rendahnya tingkat pendidikan orang tua turut berkontribusi terhadap kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan hak anak, termasuk akses terhadap pendidikan. Ketiga, kelahiran anak di luar pernikahan sering kali menimbulkan stigma sosial yang berdampak pada kurangnya pengasuhan yang memadai. Keempat, kondisi krisis ekonomi yang berkepanjangan juga memperburuk kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, sehingga meningkatkan risiko terjadinya penelantaran (Huraerah, 2018).

Maka dari itu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan pengasuhan yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan anak, baik dari aspek fisik, sosial, maupun kebutuhan lainnya. Melalui layanan tersebut, anak diharapkan dapat memperoleh kesempatan yang optimal untuk berkembang sesuai dengan karakter dan potensi yang dimilikinya.

### **Capaian *Output* Program Pelayanan Sosial**

#### ***Evaluasi Program***

Evaluasi merupakan konsep yang umum digunakan dalam berbagai organisasi dan telah banyak dibahas dalam kajian manajemen. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah evaluasi berbasis proses, yaitu metode evaluasi yang menitikberatkan pada penilaian terhadap tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses tersebut dijalankan, apakah telah sesuai dengan perencanaan, serta mengidentifikasi hambatan atau kendala yang muncul selama pelaksanaannya. Dengan demikian, evaluasi berbasis proses tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan mekanisme serta dinamika yang terjadi sepanjang proses berlangsung (Wirawan, 2011).

Pendekatan evaluasi berbasis proses merupakan metode evaluasi yang berfokus pada pengamatan serta penilaian terhadap jalannya pelaksanaan suatu program secara langsung. Dalam hal ini, perhatian utama tidak hanya ditujukan pada hasil akhir, tetapi juga pada bagaimana program tersebut dijalankan dari awal hingga akhir. Scriven menyatakan bahwa evaluasi berbasis proses bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan program, termasuk mekanisme dan prosedur yang digunakan. Oleh karena itu, pendekatan ini menekankan pentingnya analisis terhadap berbagai faktor yang muncul selama proses implementasi, serta pengaruhnya terhadap hasil yang dicapai (Scriven, 1993).

#### ***Evaluasi Input, Proses, dan Output Program/Kegiatan***

Evaluasi program pada dasarnya mencakup tiga komponen utama, yaitu input, proses, dan output. Dalam pelaksanaannya, evaluator tidak hanya berfokus pada hasil akhir (output), tetapi juga menelaah aspek input serta bagaimana proses program dijalankan. Pendekatan ini dilakukan secara sistematis untuk menilai keseluruhan pelaksanaan program, termasuk sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Melalui penggunaan data yang terstruktur, evaluasi terhadap input, proses, dan output mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kinerja program. Selain itu, hasil evaluasi tersebut juga menjadi dasar yang penting dalam upaya perbaikan dan pengembangan program secara berkelanjutan (Wirawan, 2011).

a. *Input*

Evaluasi input merupakan tahapan awal dalam analisis program yang berfokus pada penilaian terhadap ketersediaan dan kualitas sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program. Rossi, Lipsey, dan Freeman (2004) menyatakan bahwa evaluasi input mencakup penilaian terhadap berbagai komponen penting, seperti anggaran, tenaga kerja, bahan, serta peralatan yang diperlukan untuk mendukung jalannya program (Rossi, H, Lipsey, W, & Freeman, 2004).

Melalui evaluasi ini, dapat diketahui apakah sumber daya yang tersedia telah mencukupi, relevan, dan dimanfaatkan secara efisien. Dengan demikian, evaluasi input berperan penting dalam menentukan apakah suatu program memiliki dasar yang kuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. *Proses*

Evaluasi proses merupakan bagian dari evaluasi program yang menitikberatkan pada penelaahan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan program. Patton (2008) menjelaskan bahwa evaluasi proses mencakup kegiatan pemantauan serta penilaian terhadap berbagai aktivitas, prosedur, dan mekanisme yang diterapkan selama program berlangsung (Patton & Quinn, 2008).

Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana program dijalankan, termasuk mengidentifikasi kendala atau hambatan yang muncul selama implementasi. Selain itu, evaluasi proses juga berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan program tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, evaluasi ini memberikan informasi yang penting terkait efektivitas operasional serta menjadi dasar dalam melakukan perbaikan program secara berkelanjutan.

c. *Output*

Evaluasi output merupakan bagian dari evaluasi program yang berfokus pada penilaian terhadap hasil langsung yang dihasilkan setelah program dilaksanakan. Evaluasi ini menelaah produk maupun layanan yang dihasilkan, serta menilai kesesuaiannya dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan (Mertens, M, & Wilson, 2019).

Melalui evaluasi output, dapat diketahui sejauh mana program mampu mencapai tujuan-tujuan spesifik yang telah dirumuskan, serta kontribusi hasil tersebut terhadap pencapaian sasaran yang lebih luas. Dengan demikian, evaluasi output berperan penting dalam menilai kualitas dan relevansi hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program.

Penerapan tiga jenis evaluasi, yaitu evaluasi *input*, proses, dan *output*, memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sekaligus

menyediakan umpan balik yang berguna bagi pengembangan secara berkelanjutan. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi input, proses, dan output untuk menganalisis pelaksanaan program pelayanan sosial di Yayasan Sayap Ibu.

### 3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif sehingga penelitian ini akan menyajikan data dalam bentuk kata-kata atau gambar, bukan angka. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan fenomena sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Data yang dihasilkan berupa informasi deskriptif dalam bentuk lisan maupun tulisan dari individu serta perilaku yang dapat diamati sehingga dapat memberikan gambaran mengenai objek, fenomena, atau kondisi sosial secara sistematis melalui penyajian naratif (Moelong, 2017).

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Aspek *Input* Pelayanan Sosial Anak Terlantar

Berdasarkan hasil temuan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Yayasan Sayap Ibu, komponen *input* dalam pelayanan sosial anak terlantar di Yayasan Sayap Ibu menunjukkan bahwa kualitas serta keberlanjutan sangat ditentukan oleh keselarasan antara ketersediaan sumber daya dengan kerangka evaluasi program yang dikemukakan oleh Peter H. Rossi (1999), mengenai tahapan baku pelayanan sosial yang meliputi *engagement*, *assessment*, *planning*, implementasi, terminasi, evaluasi, dan *follow up*. Dalam perspektif Rossi, evaluasi program mencakup empat dimensi utama, yakni konteks, proses, *output*, dan *outcome*, yang secara konseptual dapat dipetakan ke dalam setiap tahapan pelayanan.

Pada tahap *engagement*, yayasan memanfaatkan sumber daya berupa tenaga sosial yang kompeten serta jejaring kemitraan dengan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk membangun hubungan kepercayaan dengan anak dan keluarga calon penerima manfaat. Tahap selanjutnya, yaitu *assessment*, difokuskan pada pengumpulan data komprehensif yang mencakup aspek demografis, kondisi kesehatan, serta faktor risiko keluarga, sehingga memungkinkan identifikasi kebutuhan secara spesifik sebagai dasar penyusunan rencana intervensi.

Memasuki fase *planning*, dukungan input berupa kestabilan sumber daya finansial serta ketersediaan fasilitas fisik seperti hunian, layanan klinis, dan ruang pembelajaran yang dimasukkan ke dalam perancangan program. Desain layanan tersebut mencakup pendekatan promotif melalui pendidikan nilai dan penyuluhan hak anak, pendekatan preventif melalui

skrining keluarga berisiko, konseling orang tua, serta pemberian bantuan sosial, pendekatan kuratif melalui layanan medis, terapi trauma, dan pendidikan khusus, serta pendekatan rehabilitatif melalui pelatihan keterampilan, akses pendidikan formal, dan pendampingan dalam proses adopsi maupun reintegrasi sosial.

Tahap implementasi dilakukan melalui pelaksanaan terpadu dari keempat bentuk layanan, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang dijalankan secara terkoordinasi. Proses ini disertai dengan kegiatan monitoring yang mengacu pada dimensi proses dan output sebagaimana dikemukakan oleh Peter H. Rossi, meliputi jumlah anak yang memperoleh layanan, tingkat kepatuhan terhadap prosedur, serta kualitas intervensi yang diberikan.

Selanjutnya, tahap terminasi dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap capaian tujuan jangka pendek, seperti stabilisasi kondisi kesehatan dan perbaikan aspek psikologis anak, sebelum memasuki fase *follow up*. Pada tahap ini, optimalisasi kembali sumber daya manusia menjadi kunci dalam pelaksanaan kunjungan rumah, evaluasi jangka panjang, serta penyesuaian program sesuai kebutuhan. Hal tersebut mencerminkan dimensi *outcome* dalam kerangka Rossi, yang menitikberatkan pada perubahan tingkat kesejahteraan, peningkatan kemandirian, serta keberhasilan reintegrasi sosial.

Secara keseluruhan, rangkaian proses tersebut menunjukkan bahwa sinergi antara ketersediaan input yang memadai, penerapan model evaluasi Peter H. Rossi (1999), serta tahapan pelayanan sosial yang terstruktur mampu menghasilkan integrasi layanan yang komprehensif. Kondisi ini berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan, pemulihan psikososial, serta keberlanjutan kehidupan anak-anak terlantar di Yayasan Sayap Ibu.

### **Aspek Proses Pelayanan Sosial Anak Terlantar**

Berdasarkan kerangka evaluasi program yang dikemukakan oleh Peter H. Rossi, efektivitas suatu model pelayanan sosial dapat dianalisis melalui empat dimensi pokok, yaitu relevansi, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Dimensi relevansi merujuk pada sejauh mana layanan yang diberikan mampu menjawab kebutuhan spesifik anak terlantar. Sementara itu, efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Efisiensi menitikberatkan pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, sedangkan keberlanjutan mengacu pada kemampuan program dalam mempertahankan dampak positif secara jangka panjang.

Dalam praktiknya, evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan dengan mengintegrasikan indikator kuantitatif seperti jumlah anak yang berhasil diadopsi, tingkat

kelulusan pendidikan, serta penurunan tingkat trauma dan indikator kualitatif berupa testimoni dari anak, keluarga, serta pekerja sosial, menunjukkan bahwa Yayasan Sayap Ibu telah mampu memenuhi sebagian besar kriteria yang diajukan oleh Rossi. Meskipun demikian, aspek efisiensi masih memerlukan penguatan, khususnya melalui peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung sistem pemantauan kasus secara *real time*.

Dengan demikian, model pelayanan sosial yang diterapkan tidak hanya berfungsi sebagai respons terhadap kebutuhan darurat, tetapi juga berkontribusi dalam membangun dasar yang kuat bagi perkembangan dan kemandirian anak-anak terlantar. Hal ini selaras dengan prinsip evaluasi program yang menekankan pentingnya keberlanjutan dampak serta akuntabilitas dalam implementasi intervensi sosial.

Pelaksanaan pelayanan sosial bagi anak terlantar di Yayasan Sayap Ibu dilaksanakan melalui tahapan yang saling terintegrasi, dimulai dari fase *engagement* hingga *follow up*, serta mencakup empat pendekatan utama, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pada tahap *engagement*, para pekerja sosial berupaya membangun relasi yang dilandasi kepercayaan dengan anak, keluarga, serta para pemangku kepentingan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Upaya ini berfungsi menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya perlindungan anak sebagai bagian dari strategi promotif.

Tahapan berikutnya adalah *assessment*, yang dilakukan melalui proses penyaringan risiko serta pengumpulan data komprehensif mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan preventif melalui deteksi dini, sekaligus menentukan intervensi kuratif yang diperlukan, seperti penanganan medis maupun pemulihan trauma. Berdasarkan hasil *assessment* tersebut, disusun tahap *planning* yang memuat perencanaan intervensi secara sistematis, baik dalam jangka pendek, seperti pemenuhan kebutuhan dasar maupun jangka panjang, termasuk akses pendidikan dan pengembangan keterampilan.

Selanjutnya, tahap implementasi diwujudkan melalui berbagai bentuk layanan. Pendekatan promotif direalisasikan melalui kampanye pencegahan dan edukasi bagi orang tua, sedangkan layanan preventif meliputi penyediaan penempatan sementara serta pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal.

Intervensi kuratif dalam pelayanan ini mencakup penanganan medis, konseling psikologis, serta terapi trauma yang ditujukan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental anak. Sementara itu, pendekatan rehabilitatif diarahkan pada penguatan kapasitas anak melalui akses

pendidikan formal maupun nonformal, pelatihan vokasional, serta pengembangan keterampilan sosial guna menunjang kemandirian di masa depan.

Setelah sasaran utama intervensi tercapai, dilakukan tahap terminasi yang ditandai dengan penyusunan laporan akhir serta refleksi bersama oleh tim pelaksana. Proses evaluasi program mengacu pada kerangka yang dikemukakan oleh Peter H. Rossi (1999), yang menitikberatkan pada empat dimensi utama, yaitu relevansi, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Penilaian tersebut didasarkan pada kombinasi indikator kuantitatif seperti persentase anak yang berhasil kembali ke keluarga dan tingkat kelulusan pendidikan serta indikator kualitatif berupa testimoni dari anak, keluarga, dan pekerja sosial.

Tahapan akhir berupa *follow up* dilakukan melalui kegiatan pemantauan pascaprogram dalam rentang waktu 6 hingga 12 bulan. Monitoring ini dilaksanakan melalui kunjungan rumah, komunikasi telepon, maupun pemanfaatan platform digital, dengan tujuan memastikan keberlanjutan manfaat program, mengidentifikasi kebutuhan lanjutan, serta memberikan pendampingan secara berkesinambungan kepada anak.

Secara umum, proses pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan kerangka pelayanan sosial. Namun, dari perspektif evaluasi program, mengenai efektivitas proses masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam aspek efisiensi dan konsistensi pelaksanaan. Keterbatasan sumber daya manusia serta belum optimalnya sistem monitoring menyebabkan proses pendampingan belum berjalan secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur telah tersedia, implementasi di lapangan masih memerlukan penguatan, khususnya dalam standardisasi operasional dan pemanfaatan sistem monitoring berbasis data.

### **Capaian Output Program Pelayanan Sosial untuk Anak Terlantar yang Terlaksana di LKSA Sayap Ibu**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan telah menghasilkan berbagai output yang signifikan dan memberikan dampak positif terhadap kondisi serta kualitas hidup anak terlantar. LKSA Sayap Ibu mampu meningkatkan jumlah anak yang memperoleh layanan perlindungan, rehabilitasi, dan pendampingan sosial secara komprehensif dan terukur. Hal ini tercermin dari peningkatan kualitas pelayanan, khususnya dalam aspek pembinaan psikososial dan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi anak.

Capaian tersebut tidak terlepas dari adanya sinergi yang baik antara tenaga pendamping sosial yang profesional, dukungan aktif dari lingkungan sekitar, serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, perlunya peningkatan kapasitas sumber

daya manusia, serta kompleksitas dalam proses reintegrasi sosial anak ke dalam keluarga maupun masyarakat.

Secara keseluruhan, output program dapat dikatakan cukup optimal dalam memberikan perlindungan dan menjamin kesejahteraan anak terlantar. Meskipun demikian, upaya perbaikan secara berkelanjutan tetap diperlukan, terutama dalam aspek pengelolaan program dan peningkatan kualitas layanan, guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas program di masa mendatang.

Secara lebih spesifik, pencapaian output program diukur melalui sejumlah indikator utama, antara lain jumlah anak terlantar yang berhasil memperoleh layanan secara komprehensif, tingkat pemulihan kondisi psikososial, peningkatan partisipasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta keberhasilan proses reintegrasi sosial ke dalam keluarga maupun masyarakat. LKSA Sayap Ibu menunjukkan perkembangan yang positif melalui perluasan jangkauan layanan pendampingan sosial, serta penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan yang dirancang secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

Keberhasilan pencapaian program tidak terlepas dari peran tenaga pendamping sosial yang profesional dan memiliki komitmen tinggi, serta dukungan dari keluarga dan komunitas lokal. Selain itu, sinergi dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah, turut memperkuat pelaksanaan program. Pendekatan pelayanan sosial yang digunakan berorientasi pada kebutuhan anak secara individual dan menyeluruh, dengan penekanan pada aspek psikososial, pendidikan, serta pemenuhan hak-hak dasar anak. Pendekatan ini memungkinkan pemberian layanan yang lebih tepat dan responsif terhadap permasalahan yang dialami anak terlantar.

Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup signifikan. Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu hambatan dalam mengoptimalkan kualitas layanan. Selain itu, keterbatasan anggaran turut mempengaruhi kemampuan lembaga dalam menyediakan fasilitas pendukung secara maksimal. Di sisi lain, masih terdapat kekurangan tenaga pendamping sosial yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani kompleksitas permasalahan psikososial anak terlantar, sehingga proses pendampingan belum dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dilakukan ke depan. Pertama, perlu adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, sehingga tenaga pendamping sosial dapat bekerja secara lebih profesional dan mampu menangani permasalahan anak secara lebih tepat. Kedua, diperlukan pengembangan jaringan kerja sama

yang lebih luas dan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, guna memperkuat dukungan sumber daya secara berkelanjutan. Ketiga, pemberdayaan masyarakat serta keterlibatan komunitas lokal perlu diintegrasikan dalam proses pelayanan agar memberikan dampak jangka panjang yang lebih nyata terhadap peningkatan kesejahteraan anak terlantar. Selain itu, program tidak hanya berfokus pada pencapaian target kuantitatif, tetapi juga harus menekankan kualitas hasil yang dapat dirasakan langsung oleh anak, terutama dalam pemenuhan hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Pelayanan sosial terhadap anak terlantar di LKSA Yayasan Sayap Ibu dilaksanakan melalui pendekatan yang menyeluruh dan multidimensional. Layanan ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar fisik, pendampingan dalam bidang pendidikan serta pengembangan keterampilan, dukungan psikososial, hingga perlindungan hukum dan advokasi. Pelaksanaan pelayanan dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu engagement, assessment, perencanaan intervensi, pelaksanaan program, evaluasi, terminasi, serta tindak lanjut. Seluruh tahapan tersebut berorientasi pada pemberdayaan anak dan peningkatan keterlibatan sosial, sehingga anak tidak hanya memperoleh perlindungan secara fisik, tetapi juga dukungan komprehensif dalam mengembangkan potensi diri serta mempersiapkan kemandirian di masa depan.

Pada temuan penelitian ini, proses pelaksanaan pelayanan sosial di Yayasan Sayap Ibu menunjukkan capaian yang cukup positif. Meskipun dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, tingginya tingkat pergantian staf, serta adanya stigma sosial di masyarakat, LKSA Yayasan Sayap Ibu tetap mampu menyelenggarakan layanan yang adaptif dan berkelanjutan.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari penerapan intervensi yang bersifat partisipatif dengan melibatkan berbagai aktor sosial, serta didasarkan pada pemahaman terhadap konteks sosial dan budaya anak. Pendekatan holistik ini terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian anak, sekaligus menegaskan bahwa pelayanan sosial yang efektif harus mencakup dimensi fisik, psikososial, dan perlindungan hukum secara terpadu.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan sosial ekonomi serta stigma yang melekat pada anak terlantar masih menjadi hambatan utama dalam meningkatkan efektivitas

pelayanan sosial. Kondisi tersebut tidak hanya mempengaruhi akses anak terhadap layanan, tetapi juga berdampak pada proses reintegrasi sosial mereka di lingkungan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam metode pelayanan sosial yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan anak. Selain itu, penguatan jejaring sosial serta kerja sama lintas sektor menjadi faktor penting dalam mendukung optimalisasi pelayanan. Pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten, disertai peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, akan berkontribusi terhadap keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan sosial di masa mendatang. Dengan demikian, anak-anak terlantar diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang kondusif serta memiliki peluang yang lebih baik untuk mencapai masa depan yang sejahtera.

## DAFTAR REFERENSI

- Arikunto, S. (2009). *Dasar-dasar evaluasi pendidikan*. Bumi Aksara.
- Bronfenbrenner, U., & Morris, P. A. (2006). The bioecological model of human development. *Handbook of Child Psychology*. <https://doi.org/10.1002/9780470147658.chpsy0114>
- Daro, D., & Dodge, K. A. (2009). Creating community responsibility for child protection: Possibilities and challenges. *The Future of Children*, 19(2), 67–93. <https://doi.org/10.1353/foc.0.0030>
- Dinas Sosial Provinsi Banten. (2022). *Data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Provinsi Banten*. Dinas Sosial Provinsi Banten.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar kesejahteraan sosial*. Refika Aditama.
- Gilbert, N., Parton, N., & Skivenes, M. (2011). Child protection systems: International trends and orientations. *Oxford University Press*. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199793358.001.0001>
- Heckman, J. J. (2006). Skill formation and the economics of investing in disadvantaged children. *Science*, 312(5782), 1900–1902. <https://doi.org/10.1126/science.1128898>
- Huraerah, A. (2018). Kekerasan terhadap anak dan penanganannya. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 19(2), 123–135.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). *Profil anak terlantar di Indonesia*. Kementerian Sosial RI.
- Mertens, D. M., & Wilson, A. T. (2019). Program evaluation theory and practice: A comprehensive guide. *Evaluation and Program Planning*, 72, 1–3. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2018.11.001>
- Midgley, J. (2014). *Social development: Theory and practice*. Sage Publications. <https://doi.org/10.4135/9781446294536>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Patton, M. Q. (2008). *Utilization-focused evaluation* (4th ed.). Sage Publications.

- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). *Evaluation: A systematic approach* (7th ed.). Sage Publications.
- Scriven, M. (1993). *Evaluation thesaurus* (4th ed.). Sage Publications.
- Shonkoff, J. P., & Garner, A. S. (2012). The lifelong effects of early childhood adversity and toxic stress. *Pediatrics*, *129*(1), e232–e246. <https://doi.org/10.1542/peds.2011-2663>
- Soetarso. (1993). *Kesejahteraan sosial: Pelayanan sosial dan kebijakan sosial*. STKS Press.
- United Nations Children’s Fund (UNICEF). (2019). Child protection systems strengthening. *UNICEF*. <https://doi.org/10.18356/0f3c0f3a-en>
- Wirawan. (2011). *Evaluasi: Teori, model, standar, aplikasi, dan profesi*. Rajawali Pers.
- Yayasan Sayap Ibu Banten. (2025). *Profil dan program Yayasan Sayap Ibu dalam penanganan anak terlantar di Banten*.
- Zastrow, C., & Kirst-Ashman, K. K. (2016). *Understanding human behavior and the social environment* (10th ed.). Cengage Learning.